



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KOTA YOGYAKARTA  
2018**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, hanya karena berkah, rahmat, serta hidayahNya-lah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017 berhasil diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan komunikasi informasi dan persandian berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2017-2022.

Saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang tidak bisa dihindarkan untuk dilaksanakan, dalam kondisi masyarakat Kota Yogyakarta yang kritis dan dinamis, setiap perangkat daerah harus bisa menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan pencapaian sesuai target yang direncanakan. LKIP 2017 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

Akhirnya laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin dalam penyajiannya namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja, dan hal tersebut akan senantiasa diupayakan lebih baik lagi pencapaiannya di tahun-tahun mendatang.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP ini, semoga amal baiknya diterima Allah SWT, dan semoga dokumen LKIP ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 31 Januari 2018  
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
Dan Persandian Kota Yogyakarta

**Ig. Trihastono, S.Sos.MM**  
**NIP 19690723 199603 100**

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tahun 2017 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan komunikasi, informasi dan persandian di Kota Yogyakarta serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

LKIP ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan, rencana pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasar (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyeleggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- j) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- k) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
- l) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 adalah :

- a) Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- b) Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD
- c) Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di komunikasi, informasi, persandian dan statistik
- e) Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya
- f) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya
- g) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

### **1.4. Gambaran Umum Organisasi**

#### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

#### **Tugas**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

## **Fungsi**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

## **Struktur Organisasi**

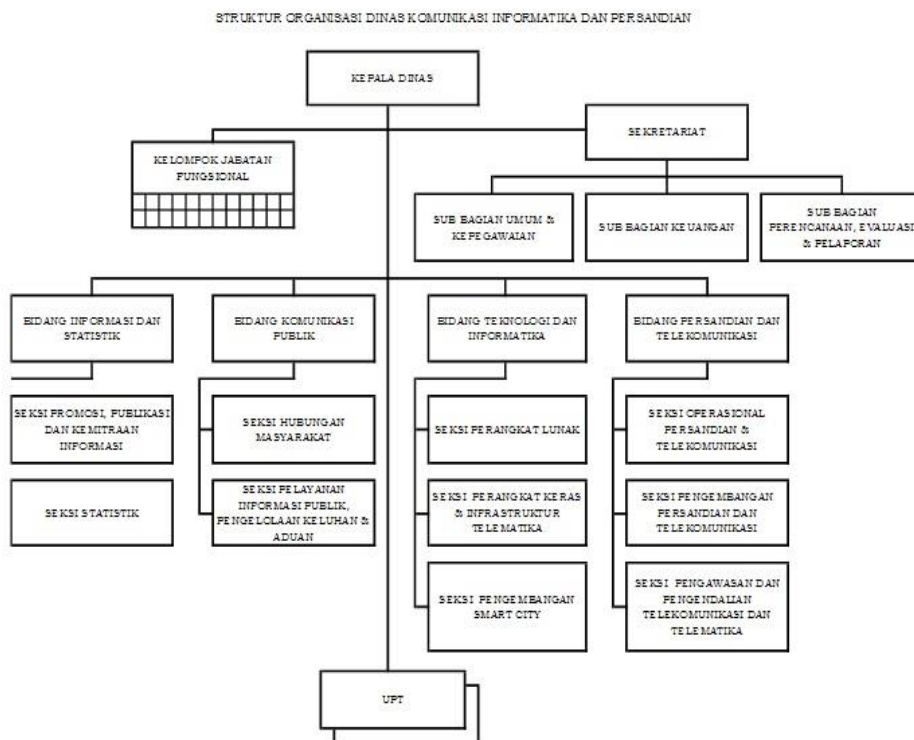
- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Kantor sebagaimana dimaksud butir 2 diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Informasi dan Statistik, terdiri dari
  - 1) Seksi Promosi, Publikasi, dan Kemitraan Informasi
  - 2) Seksi Statistik

- d. Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari :
  - 1) Seksi Hubungan Masyarakat
  - 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik, pengelolaan keluhan dan aduan
- e. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perangkat Lunak
  - 2) Seksi Perangkat Keras dan Infrastruktur Telematika
  - 3) Seksi Pengembangan Smart City
- f. Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Operasional Persandian Telekomunikasi
  - 2) Seksi Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
  - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Telematika
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara skematis untuk Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dituangkan dalam skema sebagai berikut :



## 1.5 Lingkungan Strategis yang berpengaruh.

### 1.5.1 Kondisi Geografis dan Kependudukan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan merupakan kota yang “terbuka”. Banyak penduduk datang ke Kota Yogyakarta baik sebagai penduduk tetap atau tinggal sementara. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32,5 km<sup>2</sup> terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan, meliputi 614 RW dan 2.322 RT. Kondisi sosial masyarakat yang beragam juga menjadikan lingkungan strategis yang berpengaruh dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informasi dan persandian serta statistik di Kota Yogyakarta.

### 1.5.2 Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah 46 orang, terdiri dari : 39 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Tenaga Bantuan (Naban) dan 4 orang tenaga teknis .

#### Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan Eselon :

Eselon	Jumlah
II	0
III	3
IV	12
Non Eselon	24

#### Perbandingan jumlah karyawan berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	1
III	33
II	5
I	0

#### Perbandingan jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	0
S2	5
S1	16
DIV	1
D3	7
SMA	9
SLTP	1



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Tingkat Pendidikan paling tinggi adalah S2 dengan jumlah pegawai 5 orang, paling rendah adalah lulusan SLTP sejumlah 1 orang, sedangkan jumlah lulusan S1 sejumlah 16 orang.

### 1.5.3 Perlengkapan

Asset perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5.3

**Daftar Jenis Barang Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan  
Persandian Kota Yogyakarta  
Per 31 Desember 2016**

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda Empat	4
2.	Kendaraan Roda Dua	15
3.	Ruang Rapat	1
4.	Komputer	57
5.	Printer	27
6.	Notebook	31
7.	Telepon	419
8.	Mesin Faximile	12
9.	Meja Kerja	78
10.	Kursi Kerja	188
11.	Meja Rapat	14
12.	Kursi Rapat	24
13.	Almari	57
14.	Filing Kabinet	28

## 1.6 Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah tahun 2015 sebesar Rp 20.839.458.865,- Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 2.670.725.775,- Belanja langsung Rp 18.168.733.090,- Perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung 87.19 % dibanding 12.81 %

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Anggaran Belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian**

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran Tahun 2017</b>
Belanja Tidak langsung	Rp 2.670.725.775
Belanja Langsung	Rp 18.168.733.090,-

### **Komposisi Anggaran Belanja Tidak Langsung**

Rincian penggunaan alokasi belanja Tidak langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017 sebagai berikut :

<b>Rincian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.993.176.133
Tunjangan Keluarga	171.075.677
Tunjangan Jabatan Struktural	129.921.500
Tunjangan Jabatan Fungsional	43.400.000
Tunjangan Fungsional Umum	83.481.125
Tunjangan Beras	102.438.090
Tunjangan PPh	18.558.840
Pembulatan Gaji	26.654
Iuran Asuransi Kesehatan	570147.546
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.220.210
Tunjangan Pengamanan Persandian	59.280.000

## Komposisi Anggaran Belanja Langsung

Rincian penggunaan alokasi belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>866.227.020</b>
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Konsultasi	241.960.000
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan Perlengkapan Kantor	466.392.100
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	157.874.920
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>242.669.400</b>
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Bangunan Kantor	114.781.400
2.2	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	124.888.000
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>	<b>48.500.000</b>
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	48.500.000
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>71.728.000</b>
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	71.728.000
5	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika</b>	<b>13.044.563.264</b>
5.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Infomrasi dan Telematika	797.564.600
5.2	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	12.042.450.664
5.3	Pengembangan Smart City	204.548.000
6	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Statistik</b>	<b>1.514.821.414</b>
6.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1.514.821.414
7	<b>Program Peningkatan Komunikasi Publik</b>	<b>1.327.447.242</b>
7.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	872.362.828
7.1	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	455.084.414
8	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Statitik</b>	<b>207.922.300</b>

8.1	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	207.922.300
9	<b>Program Pengembangan Pelayanan Persandian</b>	844.854.450
9.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	363.360.000
9.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	410.909.450
9.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	70.585.000
	<b>Jumlah</b>	<b>18.168.733.090</b>

## 1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini merupakan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selama Tahun 2017 yang dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sehingga tercermin tingkat keberhasilan organisasi tahun 2017.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Lingkungan Strategis yang berpengaruh
- 1.6. Anggaran
- 1.7. Sistematika Penulisan

### BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANAN KINERJA

- 2.1 RENCANA STRATEGIK
  - 2.1.1 Visi
  - 2.1.2 Misi
  - 2.1.3 Tujuan

- 2.1.4. Sasaran
- 2.1. 5. Strategi Pencapaian
- 2.1. 6. Kebijakan

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2016

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Capaian Kinerja Indikator Utama
- 3.3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
- 3.4 Realisasi Anggaran dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

### BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIK**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat visi , misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan stratejik tingkat SKPD berupa dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan stratejik tingkat kota berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

##### **2.1.1 Visi**

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi SKPD merupakan penjabaran sekaligus implementasi visi dan misi Kota Yogyakarta. Adapun Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah :

**“ Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan “**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

- 3) Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- 5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman
- 7) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke tujuh yaitu “ Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih “.

Dengan melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah :

#### Visi

**“TERCIPTANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG HANDAL MENUJU YOGYAKARTA SMART CITY”**

#### **2.1.2 Misi**

Dalam upaya mencapai Visi yang diemban maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:

#### Misi

1. Meningkatkan kualitas dan sebaran layanan deseminasi informasi melalui kemitraan dengan penyelenggara media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi
2. Memberdayakan potensi komunikasi di masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika
3. Mendukung proses kerja internal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi manajemen yang handal, update dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Membangun kualitas jaringan teknologi informasi yang mandiri, terintegrasi dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan smart city di Kota Yogyakarta

5. Menciptakan sistem kerja berbasis teknologi informasi yang handal dan terjamin keamanannya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi

### **2.1.3 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatkan layanan Informasi Publik
2. Meningkatkan Keamanan Informasi

### **2.1.4 Sasaran**

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam upaya menuju tercapainya visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian , maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017-2022 yaitu:



1. Layanan Informasi Publik Meningkat
2. Keamanan Informasi Meningkat

Guna mengukur Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta target-targetnya , kami sajikan dalam tabel berikut ini

**Tabel 2.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%) PADA TAHUN KE-					
			AWAL	AKHIR			1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	23.56	47.92	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	67.24	72.21	77.18	82.15	86.93
2	Meningkatkan Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	40.70	79.40	Keamanan Informasi Meningkat	Indeks Pengamanan Informasi	75.70	78.40	81.40	84.40	87.10	92.80

### 2.1.5 Strategi

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah :

1. Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik
2. Peningkatan komunikasi publik
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
4. Peningkatan pelayanan persandian

### 2.1.6 Kebijakan

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
2. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media
3. Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik
4. Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
5. Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
7. Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
8. Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
9. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
10. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
11. Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi
12. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

**Tabel 2.1.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD**

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan			
Misi 7 : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Layanan Informasi Publik  Meningkatkan Keamanan Informasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik	Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah
			Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Melalui Berbagai Media
		Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam penerbitan Buku Statistik	
		Peningkatan Komunikasi Publik	Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi

			Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
		Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
			Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
			Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
			Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
	Keamanan Informasi	Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
			Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Program yang diakomodir dalam Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berjumlah 8(lima) Program dan 17 (tujuh belas ) kegiatan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan Keuangan
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Aparatur</b>
2.1.	Penyediaan Jasa pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
4.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Kinerja OPD
<b>5</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Statistik</b>
5.1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
	Kegiatan Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Komunikasi Publik</b>
6.1	Kegiatan Pelayanan Kehumasan dan Informasi
6.2	Kegiatan Pengelolaan Keluhan dan Aduan
<b>7</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika</b>
7.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Infomrasi
	Pengeloalan Perangkat Keras dan jaringan Teknologi Infomatika
	Pengembangan Smart City
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Persandian</b>
8.1	Kegiatan Operasional Persandian
8.2	Kegiatan Pengembangan Persandian
8.3	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi

## 2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam tahun 2017 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menetapkan rencana kinerja sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Layanan Informasi Publik Meningkatkan	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98
2	Keamanan Informasi Meningkatkan	Indeks Pengamanan Informasi	75.70

Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan sebagai penetapan SKPD dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Layanan Komunikasi Publik Meningkatkan	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98%	- Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Rp 1.722.743.714
				Program Peningkatan Komunikasi Publik	Rp 1.327.447.242
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Rp 13.044.563.264
2	Keamanan Informasi Meningkatkan	Indeks Keamanan Informasi	75.70%	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Rp 844.854.450

**Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	61.98	67.24	72.21	77.18	82.15	86.93	86.93%
	Prosentase pemanfaatan data untuk pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam	94	94	95	95.50	96	96.50	97	97

	tempo maksimal 2x24 jam								
	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	19.93	19.93	30.43	40.93	51.43	61.93	71.80	71.80
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	57.32	57.32	63.69	69.43	75.46	80.89	86.62	86.62
2	Indeks Pengamanan Informasi	75.70	75.70	78.40	81.40	84.40	87.10	92.80	92.80
	Persentase pengamanan informasi	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengamanan informasi	19	19	23	38	48	57	76	76

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra SKPD.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Oleh karena itu salah satu cara untuk mengukur Keberhasilan SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan mengukur capaian kinerja menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.



Berikut merupakan rekapitulasi realisasi pencapaian organisasi Tahun 2017. Kami sajikan capaian tahun 2017 karena merupakan OPD baru yang mulai melaksanakan kegiatan sejak awal 2017.

No	Nama Indikator	Target	Rumus Pengukuran	Perhitungan Tahun 2017	Hasil
	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	$(20\%*100+20\%*96+60\%*((19.33+57.32)/2))*100$	62.38
	Indeks Pengamanan Informasi		70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan	$=((70\%*100)+(30\%*19))*100$	75.70

Dilihat dari target 61,98 dan pencapaian 62.38 pada indikator kinerja Indeks Layanan Informasi Publik maka pencapaiannya adalah 100,65 %, pencapaian diatas 100% ini dikarenakan pada salah satu unsur penilaian yakni pada salah satu indikator program yakni Program Peningkatan Komunikasi publik dengan indikator Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam jumlah realisasi melebihi jumlah presentase target yang ditetapkan yakni mencapai 96% dari target 94%.

Sementara itu untuk indikator Indeks Pengamanan Informasi jumlah target dan realisasinya sama sehingga tercapai 100%

Pencapaian diatas didukung oleh pencapaian masing masing program yang juga mencapai 100 persen dalam target sesuai formula indikator program dari masing-masing program yang ada. Untuk program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika salah satu indikatornya adalah prosentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, dari kinerja tahun 2017 jumlah aplikasi yang dibangun adalah 90 aplikasi dari rencana 157 web dan SIM yang akan dibangun sampai dengan akhir

periode RPJMD pada tahun 2022 nanti, dari perhitungan ini didapatkan angka 57.32% sesuai target yang direncanakan yakni 52,32% sehingga pencapaiannya mencapai angka 100%.

Pada Program Peningkatan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam dengan perhitungan (Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%, dari total pesan masuk selama 2017 sejumlah 2922 pesan dari 3044 pesan telah ditindaklanjuti sehingga mencapai 96% melebihi dari target yang ditetapkan yakni 94%.

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Sasaran I : Layanan Informasi Publik Meningkat

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017			Target Jangka Menengah 2016	Capaian sd 2016 terhadap jangka menengah
		Target	Realisasi	%		
Indeks Layanan Informasi Publik	-	61.98	62.38	100.65	61.98	100.65

Capaian Indikator Kinerja Indeks Layanan Informasi Publik diperoleh dari hasil perhitungan hasil capaian dari beberapa indikator program yang mendukung indikator kinerja indeks layanan informasi publik yaitu :

1. Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam sebagai indikator program Peningkatan Komunikasi Publik. Pada indikator ini jumlah presentase tindak lanjut aduan pertanyaan usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo 2x24 jam mencapai 96% dari target 94% . capaian ini diperoleh dari dari total pesan masuk selama 2017 sejumlah 2922 pesan dari 3044 pesan telah ditindaklanjuti.
2. Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik sebagai indikator Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika. Formula yang digunakan adalah  $((\text{Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi} / \text{Jumlah ruang publik}) + (\text{Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV} / \text{Jumlah ruang publik}))$

publik)) / 2) x 100. Capaian dari program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika ini mencapai 100 persen karena semua target kinerja pemasangan CCTV dan pemasangan wifi di ruang publik dilaksanakan semuanya.

3. Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun sebagai indikator kedua dari Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika juga telah melaksanakan seluruh target yang ditetapkan yakni sejumlah 90 web dan aplikasi sampai dengan tahun 2017 dari target keseluruhan di akhir masa RPJMD sejumlah 157 web dan sim.
4. Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan sebagai indikator program Pengelolaan Informasi dan Statistik dengan formula (Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data)x 100% telah mencapai target yang diharapkan yakni sejumlah 14 buku statistik telah dimanfaatkan.

Dari 20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pencapaian yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandaian adalah 100.65 %

#### Sasaran II : Keamanan Informasi Meningkat

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017			Target Jangka Menengah 2016	Capaian sd 2016 terhadap jangka menengah
		Target	Realisasi	%		
<b>Indeks Pengamanan Informasi</b>	-	<b>75.70</b>	<b>75.70</b>	<b>100</b>	<b>75.70</b>	<b>100</b>

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengamanan diperoleh dari hasil perhitungan hasil capaian indikator program yang mendukung indikator kinerja indeks pengamanan informasi yaitu :

1. Persentase pengamanan informasi sebagai indikator I Program Peningkatan Pelayanan Persandian dengan formula indikator Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus \*100% . Pada tahun 2017 pencapaian persentase pengamanan informasi mencapai 100% dimana pada tahun 2017 tidak ada kasus dalam kebocoran informasi.
2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dengan formula indikator Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah \* 100%. Pada

tahun 2017 jumlah OPD yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi sejumlah 10 OPD dari total 56 OPD sehingga pencapaian adalah 19%. Dari 70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan pencapaian kinerja sejumlah 75.70 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dihadapi beberapa kondisi umum saat ini, seperti berikut merupakan daftar permasalahan dan upaya pemecahannya :

	<b>PROGRAM /KEGIATAN</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>UPAYA PEMECAHAN MASALAH</b>
<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika</b>			
	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	Kerbatasan SDM (tenaga programmer )	Kerjasama dengan penyedia barang dan jasa bidang TI
	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknolgi Informasi dan Telematika	Keterbatasan personil yang mumpuni Prosedur yang belum tertata dengan baik	Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga Menyusun dan membentuk kebiasaan bekerja dengan prosedur standar
	Pengembangan Smart City	Regulasi terkait smart city yang dijadikan pedoman belum tersusun	Menggunakan dokumen kajian implementasi smart city yang sudah disusun
<b>Program Pengelolaan Informasi dan Statistik</b>			
	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	Belum adanya dukungan dana untuk kegiatan komunikasi dari pusat	Diikutsertakan pada kegiatan yang lain
<b>Program Peningkatan Komunikasi Publik</b>			
	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Keterbatasan media informasi Perkembangan isu-isu di media sosial yang tidak terbendung	Kerjasama dengan berbagai media massa Koordinasi yang lebih intensif untuk menjawab isu-isu media sosial yang berkembang
	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	Adanya OPD yang belum responsif	Koordinasi antar operator OPD yang lebih intensif
<b>Program Pengelolaan Informasi dan Statistik</b>			
	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	Keterbatasan SDM	Kerjasama dengan BPS Kota Yogyakarta
<b>Program Peningkatan Pelayanan Persandian</b>			
	Operasional Persandian	- Keterbatasan SDM	- Membentuk Tim

	dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan sarana dan prasarana</li> <li>- Keterbatasan plafon anggaran</li> </ul>	<p>Kegiatan yang melibatkan OPD Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pinjam pakai barang</li> <li>- Mengoptimalkan plafon anggaran yang ada</li> </ul>
	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan SDM</li> <li>- Keterbatasan sarana dan prasarana</li> <li>- Keterbatasan plafon anggaran</li> <li>- Belum memiliki standar keamanan informasi di Pemkot Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim Kegiatan yang melibatkan OPD Lain</li> <li>- Melakukan pinjam pakai barang</li> <li>- Mengoptimalkan plafon anggaran yang ada</li> <li>- Melaksanakan tahap perancangan standar keamanan informasi</li> </ul>
	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan SDM</li> <li>- Belum adanya regulasi daerah yang jelas</li> <li>- Keterbatasan sarana dan prasarana</li> <li>- Keterbatasan plafon anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim Kegiatan yang melibatkan OPD Lain</li> <li>- Mengoptimalkan regulasi daerah yang ada walaupun dilaksanakan secara parsial</li> <li>- Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada</li> <li>- Mengoptimalkan plafon anggaran yang ada</li> </ul>

### 3.3 REALISASI KEUANGAN

Berikut merupakan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Penyerapan anggaran belanja langsung Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2017 sebesar 94,18% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pengelolaan Informasi dan Data Statistik di sasaran Meningkatnya Layanan Informasi Publik Meningkat dan tercapai 96.72 %. Sedangkan pada Program Peningkatan Pelayanan Persandian di sasaran Keamanan Informasi meningkat mencapai 95.05%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Relalisasi	%
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>866.227.020</b>	<b>763.426.864</b>	<b>88.13</b>
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat dan Konsultasi	241.960.000	237.722.274	95.14
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa, peralatan dan Perlengkapan Kantor	466.392.100	389.292.018	83.47
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	157.874.920	136.412.572	86.41
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>242.669.400</b>	<b>167.026.763</b>	<b>68.83</b>
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Bangunan Kantor	114.781.400	94.146.450	82.02
2.2	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	124.888.000	72.880.313	56.99
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>	<b>48.500.000</b>	<b>38.250.000</b>	<b>78.87</b>
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	48.500.000	38.250.000	78.87
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>71.728.000</b>	<b>65.424.500</b>	<b>91.21</b>
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	71.728.000	65.424.500	91.21
5	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika</b>	<b>13.044.563.264</b>	<b>12.523.203.016</b>	<b>96</b>
5.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Infomrasi dan Telematika	797.564.600	682.683.405	85.60
5.2	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	12.042.450.664	11.670.171.511	96.91
5.3	Pengembangan Smart City	204.548.000	170.348.100	83.28
6	<b>Program Pengelolaan Informasi</b>	<b>1.514.821.414</b>	<b>1.465.133.270</b>	<b>96.72</b>

	<b>dan Statistik</b>			
6.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	1.514.821.414	1.465.133.270	96.72
7	<b>Program Peningkatan Komunikasi Publik</b>	1.327.447.242	1.263.009.000	95.15
7.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	872.362.828	856.428.500	98.17
7.1	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	455.084.414	405.580.500	89.34
8	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Statistik</b>	207.922.300	196.646.150	94.58
8.1	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	207.922.300	196.646.150	94.58
9	<b>Program Pengembangan Pelayanan Persandian</b>	844.854.450	803.320.736	95.08
9.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	363.360.000	352.841.736	97.11
9.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	410.909.450	382.664.300	93.13
9.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	70.585.000	67.814.700	96.08
	<b>Jumlah</b>	<b>18.168.733.090</b>	<b>17.285.440.299</b>	<b>95.14</b>

Analisis dari masing masing kegiatan terkait dengan pencapaian kinerja anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penyediaan rapat-rapat dan Konsultasi, pencapaian 95% karena pada rekening belanja makan minum harian pegawai tidak terserap seluruhnya karena menyesuaikan dengan jumlah hari kerja.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor hanya tercapai 83.47% dikarenakan tidak adanya tim dalam kegiatan PAP sehingga honor tim tidak diberikan pada belanja pegawai honorarium tim PNS, belanja listrik dan elektronik, bahan komputer, alat rumah tangga yang sudah tercukupi, belanja STNK yang sudah sesuai tarif, beberapa alat masih berfungsi sehingga anggaran belanja pemeliharaan alat kantor tidak terserap sesuai rencana serta menyesuaikan dengan harga pasaran dan negosiasi pada beberapa belanja pengadaan meja dan kursi kerja.
3. Kegiatan Penyediaan jasa pengelola Pelayanan Perkantoran, hanya tercapai 86.41% karena ada salah satu pegawai Naban yang pensiun per Januari 2017 sehingga honorarium pegawai honorer/tidak tetap tidak terserap semua.
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor hanya tercapai 82.02% karena pada belanja bahan bakar minyak dan gas pelumas untuk genset tidak banyak dipakai disebabkan tidak sering terjadi pemadaman listrik.

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas hanya terserap 56.99 % dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi kendaraan, banyak kendaraan yang masih berfungsi dengan baik suku cadangnya serta pada belanja bahan bakar menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan operasional.
6. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas hanya terserap 81.48 % karena menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan SDM
7. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD telah sesuai dengan target, capaian realisasi keuangan menyesuaikan dengan jumlah tim yang ada.
8. Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika hanya terserap 85.60% karena dua programmer yang ada tidak sesuai kualifikasi, pada belanja jasa tenaga ahli salah satu tenaga ahli yang dipakai tidak memenuhi kualifikasi serta adanya penyesuaian harga negosiasi pada belanja modal pengadaan komputer dan pada belanja pemeliharaan renovasi komputer menyesuaikan dengan kerusakan yang ada.
9. Pengelolaan Perangkat keras dan jaringan Teknologi Informasi, tercapai 96.91% karena menyesuaikan jumlah rapat pada belanja makan minum rapat, menyesuaikan dengan kerusakan perangkat pada belanja pemeliharaan peralatan, serta menyesuaikan dengan harga negosiasi pada beberapa belanja modal pengadaan komputer.
10. Pengembangan Smart City realisasi anggaran hanya mencapai 83.28% karena menyesuaikan dengan ketentuan jumlah tim dan waktu pelaksanaan pada honorarium PNS dan Non PNS serta menyesuaikan dengan jumlah rapat pada belanja makan minum rapat.
11. Kegiatan Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi anggaran terserap 96.72% karena mengikuti jumlah hari pada belanja honorarium PNS dan Non PNS, mengikuti jumlah berat paket dalam belanja pos pengiriman Media Info Kota, serta adanya selisih negosiasi harga dalam belanja cetak MIK.
12. Kehumasan dan Pelayanan Informasi jumlah anggaran yang terserap mencapai 98.17% banyak rekening yang sesuai dengan target perencanaan. Ketidak capaian karena menyesuaikan dengan kehadiran wartawan pada anggaran makan minum rapat pada saat Jumpa Pers serta menyesuaikan dengan jumlah narasumber yang hadir pada Jumpa Pers,.
13. Kegiatan Pengelolaan Keluhan dan Aduan, realisasi anggaran hanya mencapai 83.34% hal ini dikarenakan adanya sponsorship dalam pencetakan sticker UPIK pada belanja cetak dan belanja perjalanan dinas



dalam daerah tidak diberikan karena peserta workshop PPID adalah PNS sehingga bantuan transport tidak diberikan.

14. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data Statistik, realiasi anggaran mencapai 94.58% karena disebabkan 3 output buku tidak jadi dicetak karena sudah jadi output BPS Kota Yogyakarta.
15. Kegiatan Operasional Persandian dengan capaian realisasi anggaran 98.33% semua sudah sesuai target yang direncanakan. Ada belanja jasa tenaga ahli yang capaiannya hanya 75% karena salah satu tenaga ahli difasilitasi oleh Lembaga Sandi Negara.
16. Kegiatan Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi, capaian realisasi anggaran adalah 93.13%, anggaran yang tidak terserap karena Tim JKS tidak ada yang non PNS serta salah satu narasumber difasilitasi oleh Lembaga Sandi Negara.
17. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika, realisasi anggaran mencapai 98.41% salah satu belanja yang tidak sesuai rencana adalah belanja makan dan minum rapat karena survey menara telekomunikasi tidak dapat dilaksanakan karena beluma ada regulasi.

Demikian analisis capaian kinerja keuangan berdasarkan Laporan Relalisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta 2017.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

LKIP merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informasi dan persandian serta statistik. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, untuk OPD yang baru terbentuk Laporan Ini belum bisa menyajikan pencapaian tahun-tahun sebelumnya karena dibentuk dari berbagai OPD , sehingga belum bisa melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah amat baik. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang pada tahun 2017 anggaran terserap 94.16 % .

Demikian LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan Kinerja Organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta 31 Januari 2018  
PLt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Kota Yogyakarta

Iq. Trihastono, S.Sos.MM  
NIP 19690723 199603 1005

